

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat (30) disebutkan bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan Rancangan Awal Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian Rancangan Renja OPD

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas melaksanakan

Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diciptakanlah Visi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu "***Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Mandiri, Pembangunan, Berkualitas dan Sejahtera***".

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan Keluarga Berencana yang berkesinambungan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun oleh masyarakat termasuk swasta. Pembangunan Keluarga Berencana lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas masyarakat yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2017. Mewujudkan hal tersebut bukanlah mudah karena Keluarga Berencana juga memiliki masalah utama yang dihadapi yakni Tingginya Angka Kelahiran, Rendahnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, tingginya harga alat kontrasepsi serta terbatasnya sumber pembiayaan Keluarga Berencana, juga belum optimalnya alokasi pembiayaan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand design Pembangunan Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur,

Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran hun 2007 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabuapten Tapanuli Selatan;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/73/KPTS/Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan.
23. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/459/KPTS/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.
24. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800/678/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dijadikan serbagai Tolak Ukur untuk memberikan arahan dan sekaligus melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misi lima tahun kedepan serta menuntun seluruh penyelenggaraan kegiatan dalam setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran sehingga dapat memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pelayanan organisasi perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah :
- Bab V : Penutup
- Lampiran – lampiran/Pendukung

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2019, serta progres pencapaian kinerja dalam renstra periode 2016-2021 sehingga dapat diidentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan penyediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dan rencana kinerja Tahun 2018 sehingga kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan masih melanjutkan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan melakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan Tahun 2018 meskipun pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, Visi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu ***Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Mandiri, Pembangun, Berkualitas dan Sejahtera***".

Sedangkan Misi yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial
2. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat
3. Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi
4. Melakukan Pembinaan Keluarga (Bina Keluarga)
5. Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

6. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai fungsi dan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan 4 (empat) urusan, 14 program dan 39 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 6. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
 7. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan Kantor.
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan peralatan rumah tangga.
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan.
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2. Penyusunan Laporan Semesteran

- f. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan:
 - 1. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten

- g. Program Keluarga Berencana :
 - 1. Dana Bergulir untuk Kelompok UPPKS bertujuan mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga yang menjadi kelompok UPPKS di pedesaan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dengan dana Rp. 40.000.000
 - 2. Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan bertujuan mengadakan pelayanan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka peningkatan peserta KB dengan dana Rp. 75.000.000
 - 3. TKBK Desa/Kelurahan bertujuan mengadakan pelayanan ke kecamatan-kecamatan dalam rangka peningkatan peserta KB dengan dana Rp. 53.620.000
 - 4. Orientasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) bertujuan mengadakan sosialisasi kepada PPKBD terkait tugas dan fungsi dalam rangka penyuluhan KB di Pedesaan dengan dana Rp. 30.000.000,-
 - 5. TNI Manunggal KB Kesehatan bertujuan mengadakan pencanangan sekaligus melaksanakan pelayanan ke Kecamatan-Kecamatan yang bekerja sama dengan TNI dengan dana Rp. 79.880.000
 - 6. Pendataan Keluarga bertujuan untuk penyusunan dokumen Grand Design Kependudukan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dana Rp. 133.622.000

- h. Program Pelayanan Kontrasepsi:

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB yaitu melaksanakan pemasangan kontrasepsi dengan cara operasi kecil kepada PUS yang di pusatkan di RSUD Sapirook dengan dana Rp. 50.230.000,-
 2. Pengadaan Alat Kontrasepsi yaitu mengadakan obat-obatan (Site Effect) dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi dengan dana Rp. 7.000.000
- i. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri :
1. Penerangan KIE melalui Sarana Mupen KB bertujuan mengadakan pemutaran film tentang KB ke kecamatan-kecamatan dalam rangka pencapaian peserta KB Baru dengan dana Rp. 22.280.000
 2. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB bertujuan untuk membangun sarana prasarana dalam rangka mendukung pencapaian Akseptor Baru dengan dana Rp. 1.100.000.000
 3. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana bertujuan untuk memenuhi operasional PPLKB/PLKB dalam rangka penyuluhan di Kecamatan dengan dana Rp. 4.420.270.000
- j. Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR :
1. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah dengan tujuan untuk mengadakan penganangan sekaligus sosialisasi sebagai Duta GenRe dalam rangka pencapaian program KKBPK dengan dana Rp. 115.000.000

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 163 Tahun 2016 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

❖ Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan.

❖ Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
7. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan KB.
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
11. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;

7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran
- c) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat
- d) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten dan kota.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

a) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan

b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB/KKB

Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB/KKB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

IV. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- d) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- e) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat, Obat dan Kontrasepsi

Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon.

b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB.

c) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB

Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB

V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja .
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia.

c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja

VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Pegawai	L	P	JUMLAH
1	PNS	10	30	40
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	-	-
4	Honor Provinsi (PLKB)	-	-	-
5	Out scorching	5	19	24
Jumlah		15	49	64

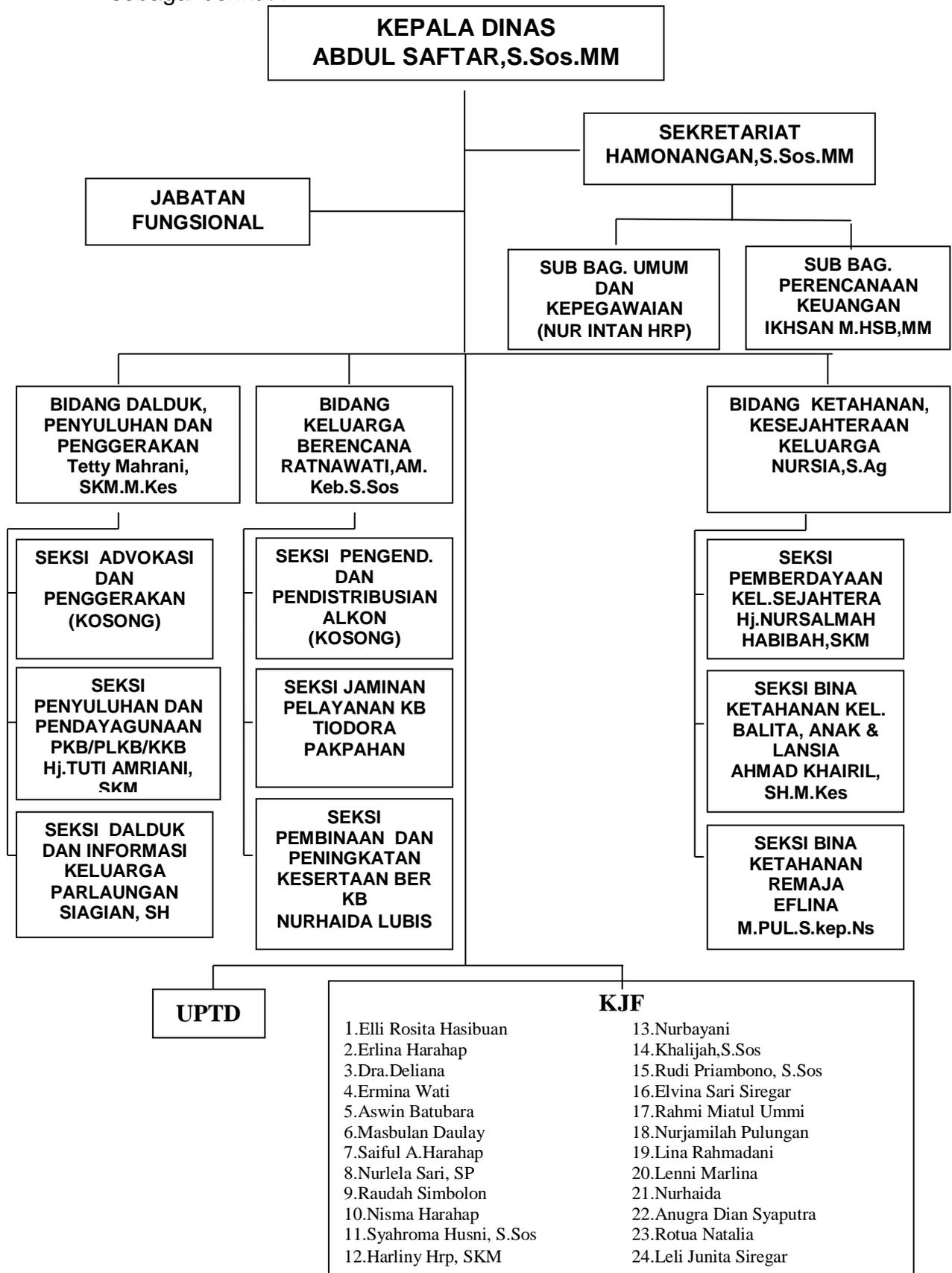
Sumber Daya Asset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung Tempat Kerja	6 Unit	1 Kantor Dalduk dan KB, 14 Balai KB dan 1 Gudang Alkon
2.	Kendaraan Roda 4	Unit	Mobil Kepala Dinas, Mobil Sekretaris Dinas, Mobil Akseptor, Mobil Pelyanan KB, Mobil Mopen dan Mobil Box
3.	Kendaraan Roda 2	2 Unit	-
4.	Meja	7 Buah	-
5.	Kursi	100 Buah	-
6.	Laptop	4 Unit	-
7.	Personal Computer (PC)	4 Unit	-
8.	Proyektor	Unit	-
9.	Telephon Mobil (Smartphon)	4 Unit	Mengonlinekan Data

Daftar Nama KKBPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL YG DIKUASAI
1	Elli Rosita Hasibuan, SH	K.KKBPK	Angkola Barat	14
2	Erlina Harahap	K.KKBPK	Angkola Timur	15
3	Dra. Deliana	KKPBK		
4	Ermina Wati	KKPBK		
5	Aswin Batubara	K.KKBPK	Angkola Selatan	17
6	Masbulan Daulay	KKPBK		
7	Saiful Alamsyah Hrp	K.KKBPK	Sipirok	40
8	Nurlela Sari, SP	KKPBK		
9	Raudah Simbolon	KKPBK		
10	Nisma Harahap	K.KKBPK	Batangtoru	23
11	Syahroma Husni, S.Sos	KKPBK		
12	Harliny Harahap,SKM	KKPBK		
13	Nurbayani	K.KKBPK	Marancar	12
14	Khalijah, S.Sos	K.KKBPK		
15	Rudi Priambono, S.Sos	K.KKBPK	Batang Angkola	36
16	Elvina Sari Siregar	KKPBK		
17	Rahmi Miatul Ummi	KKPBK		
18	Nurjamila Pulungan	K.KKBPK	Arse	10
19	Lina Rahmadani, Am.keb	K.KKBPK	Sayur Matinggi	19
20	Lenni Marlina	KKPBK		
21	Nurhaida	K.KKBPK	Angk. Sangkunur	10
22	Anugrah Dian Syaputra	K.KKBPK	Muara B. Toru	9
23	Rotua Natalia	K.KKBPK	Tantom Angkola	17
24	Leli Junida Siregar	K.KKBPK	SD Hole	26

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :



Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) bahwa Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana menjadi pegawai negeri sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengalihkkkan Personil (Pengawas Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ke Pemerintah Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara sesuai Berita Acara Serah Terima Personil dan Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Nomor 800/4705/2017 dan Nomor 042/KP.02.02/B2/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang bertempat di Ruang Frankfurt, London dan Sanfransisco Hotel Adi Mulia Medan.

Selanjutnya tentang belanja pegawai PPLKB dan PLKB yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, serta hak-hak kepegawaian masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai tanggal tiga puluh satu Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-12-2017) dan mulai tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (1-01-2018), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Secara umum Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk :

- a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
- b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota

2. Keluarga Berencana (KB) :

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

3. Keluarga Sejahtera :

- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.

Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada capaian sasaran sebagai berikut :

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2017 dan 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

Tabel 1

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2017 dan 2018

No.	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4
1	Batang Angkola	913	944
2	Sayur Matinggi	541	645
3	Angkola Timur	822	939
4	Angkola Selatan	1.017	1.071
5	Angkola Barat	1.600	863
6	Batang Toru	844	874
7	Marancar	311	428
8	Sipirok	1.065	1.138
9	Arse	417	526
10	Saipar Dolok Hole	397	553
11	Aek Bilah	589	151
12	Muara Batang Toru	835	457
13	Tano Tombangan Angkola	593	606
14	Angkola Sangkunar	621	621
	Jumlah	9.796	9.816

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Adapun Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kecamatan Tahun 2016, 2017 dan 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

Tabel 2

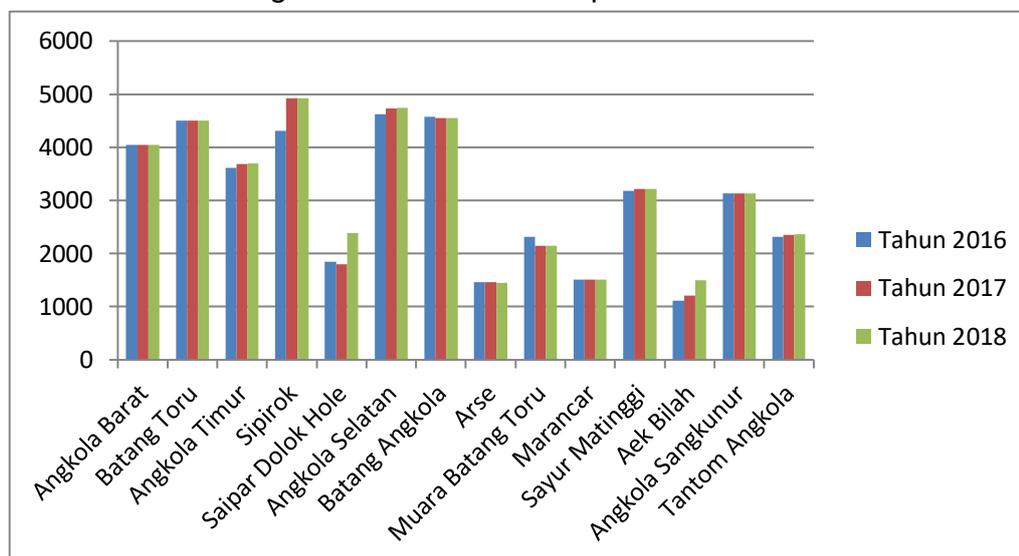
Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah PUS		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5
1	Batang Angkola	4.572	4.549	4.549
2	Sayur Matinggi	3.186	3.216	3.217
3	Angkola Timur	3.619	3.680	3.713
4	Angkola Selatan	4.624	4.734	4.739
5	Angkola Barat	4.045	4.049	4.050
6	Batang Toru	4.503	4.503	4.503
7	Marancar	1.508	1.508	1.508
8	Sipirok	4.311	4.917	4.444
9	Arse	1.457	1.457	1.473
10	Saipar Dolok Hole	1.851	1.803	2.146
11	Aek Bilah	1.108	1.209	1.406
12	Muara Batang Toru	2.320	2.153	2.153

13	Tano Tombangan Angkola	2.315	2.355	2.384
14	Angkola Sangkunur	3.131	3.131	3.131
Jumlah		42.550	43.264	43.416

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Grafik jumlah PUS Tahun 2016 s/d 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapanuli Selatan :



Salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga, yang dalam hal ini dicerminkan dalam rata-rata anggota keluarga dari rumah tangga yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari tabel dibawah diketahui bahwa rata-rata anggota keluarga Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu tahun 2014 sampal dengan 2018 cenderung turun dari 2,33 pada tahun 2017 menjadi 2,05 pada Tahun 2018.

Tabel : 3
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Kedaaan Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Anak	48.475	49.905	50.371	150.561	132.411
2	Jumlah Keluarga	66.459	69.626	71.503	64.529	64.479
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,72	0,71	0,70	2,33	2,05

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah anak per keluarga terus mengalami penurunan, menunjukkan semakin baiknya

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup keluarga berencana. Data rata-rata jumlah anak menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 4
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Menurut Kecamatan Tahun 2017 - 2018

No.	Kecamatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jlh Anak Keluarga	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-Rata Jlh Anak Keluarga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batang Angkola	15.341	7.520	2,04	14.341	7.590	1,89
2	Sayur Matinggi	11.608	5.303	2,19	10.608	5.303	2,00
3	Angkola Timur	12.036	4.955	2,43	10.886	4.955	2,20
4	Angkola Selatan	15.273	6.046	2,53	14.273	6.046	2,39
5	Angkola Barat	11.829	5.090	2,32	10.829	5.090	2,13
6	Batang Toru	14.701	7.210	2,04	13.701	7.210	1,90
7	Marancar	6.966	2.524	2,76	4.966	2.524	1,97
8	Sipirok	15.120	7.200	2,10	13.120	7.200	1,82
9	Arse	5.974	2.373	2,52	3.974	2.323	1,71
10	Saipar Dolok Hole	7.108	3.022	2,35	6.108	2.972	2,06
11	Aek Bilah	6.035	1.631	3,70	4.035	1.611	2,50
12	Muara Batang Toru	8.514	3.487	2,44	7.514	3.487	2,15
13	Tano Tombangan Angkola	8.170	4.165	1,96	7.170	4.165	1,72
14	Angkola Sangkunur	11.886	4.003	2,97	10.886	4.003	2,72
	Jumlah	150.561	64.529	2,33	132.411	64.479	2,05

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Berdasarkan kriteria penentuan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah usia 0 – 17 tahun dan belum menikah. Dari diatas terlihat bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Angkola Sangkunur dengan rata-rata sebesar 2,72. sedangkan rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2018 adalah 2,05.

Adapun jumlah Anak Umur 5 s/d 9 Tahun laki-laki dan perempuan menurut kecamatan pada Tahun 2018 :

Tabel 5
Jumlah Anak Umur 5 s/d 9 Tahun Laki dan Perempuan Menurut Kecamatan Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah umur 5 s/d 9 Tahun		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Angkola Barat	1.205	1.281	2.486
2	Batang Toru	1.079	1.166	2.245
3	Angkola Timur	1.203	1.207	2.410
4	Sipirok	1.316	1.290	2.606
5	Saipar Dolok Hole	1.081	1.101	2.182
6	Angkola Selatan	1.228	1.172	2.400
7	Batang Angkola	1.188	1.352	2.540
8	Arse	1.011	1.239	2.250
9	Muara Batang Toru	1.092	1.275	2.367
10	Marancar	1.108	1.123	2.231
11	Sayur Matinggi	1.116	1.160	2.276
12	Aek Bilah	1.073	1.034	2.107
13	Angkola Sangkunur	1.286	1.316	2.602
14	Tantom Angkola	1.016	1.134	2.150
Jumlah		16.002	16.850	32.852

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Selanjutnya Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2017 dan Tahun 2018 Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rasio Akseptor KB menurut Kecamatan Tahun 2017 dan 2018

No.	Kecamatan	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB	Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Rasio Akseptor KB
1	Batang Angkola	2.639	4.549	58,01	2.691	4.549	59,16
2	Sayur Matinggi	2.186	3.216	67,00	2.190	3.220	68,01
3	Angkola Timur	2.783	3.680	75,00	2.863	3.693	77,53
4	Angkola Selatan	3.694	4.700	78,00	4.174	4.739	88,08
5	Angkola Barat	3.217	4.049	79,00	3.275	4.050	80,86
6	Batang Toru	2.998	4.503	66,00	3.325	4.503	73,84
7	Marancar	999	1.508	66,00	1.032	1.508	68,44
8	Sipirok	3.496	4.917	71,00	3.143	4.444	70,72
9	Arse	889	1.457	61,00	930	1.470	63,27
10	Saipar Dolok Hole	1.110	1.783	62,00	1.332	2.182	61,04
11	Aek Bilah	510	1.209	42,00	692	1.417	48,84
12	Muara Batang Toru	1.967	2.153	91,00	1.967	2.153	91,36
13	Tano Tombangan Angkola	1.945	2.407	80,00	2.204	2.400	91,83
14	Angkola Sangkunur	2.649	3.131	84,00	2.771	3.253	85,18
Jumlah		31.082	43.262	71,84	32.589	43.581	74,78

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 Akseptor KB berjumlah 25.703 meningkat menjadi 32.589 pada tahun 2018, demikian juga halnya dengan Rasio Akseptor KB meningkat dari 62,06 pada tahun 2014 menjadi 74,78 pada tahun 2018. Sedangkan Rasio Akseptor KB menurut kecamatan pada tahun 2018, menunjukkan bahwa Kecamatan Tantom Angkola memiliki Rasio Akseptor KB terbesar yakni 91,83 dan Kecamatan Aek Bilah memiliki Rasio Akseptor KB terkecil yakni 48,84. Perkembangan Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 7
Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2014 - 2018

No.	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Akseptor KB	25.703	26.103	28.204	31.082	32.589
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	41.738	42.417	42.550	43.262	43.581
3	Rasio Akseptor KB	62,06	61,53	66,28	71,84	74,78

Sumber : Badan KB, PP dan PA Kab.Tapsel

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Selatan 62,06 pada tahun 2014 menjadi 61,53 pada tahun 2015, kemudian menjadi 66,28 pada tahun 2016 dan menjadi 71,84 pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 Rasio akseptor KB menjadi 74,78. Rasio akseptor KB per Kecamatan dalam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 8
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2017 dan Tahun 2018
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018			
		Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur	Jumlah Akseptor KB	Jlh Pasangan Usia Subur		
1	Batang Angkola	2.639	4.549	2.639	4.549	2.639	4.549
2	Sayur Matinggi	2.186	3.216	2.186	3.216	2.186	3.216
3	Angkola Timur	2.783	3.680	2.783	3.680	2.783	3.680
4	Angkola Selatan	3.694	4.700	3.694	4.700	3.694	4.700
5	Angkola Barat	3.217	4.049	3.217	4.049	3.217	4.049
6	Batang Toru	2.998	4.503	2.998	4.503	2.998	4.503
7	Marancar	999	1.508	999	1.508	999	1.508
8	Sipirok	3.496	4.917	3.496	4.917	3.496	4.917
9	Arse	889	1.457	889	1.457	889	1.457

10	Saipar Dolok Hole	1.110	1.783	1.110	1.783	1.110	1.783
11	Aek Bilah	510	1.209	510	1.209	510	1.209
12	Muara Batang Toru	1.967	2.153	1.967	2.153	1.967	2.153
13	Tano Tombangan Angkola	1.945	2.407	1.945	2.407	1.945	2.407
14	Angkola Sangkunur	2.649	3.131	2.649	3.131	2.649	3.131
Jumlah		28.204	31.082	43.262	31.082	43.262	31.082

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

Tabel 9
**Jumlah Angka Kelahiran Total (Tfr)
 Per WUS (15 – 49 Tahun) TAHUN 2018**

No	Kelompok Umur	ASFR / Jumlah Umur
1.	15 – 19	27
2.	20 – 24	115
3.	25 – 29	126
4.	30 – 34	104
5.	35 – 39	61
6.	40 – 44	21
7.	45 – 49	4
JUMLAH		458

Dengan Rumus :

$$TFR = \frac{\text{Jumlah Umur}}{1000} \times 5$$

$$TFR = \frac{458}{1000} \times 5 = 2,29$$

Selanjutnya kegiatan pelayanan informasi dan konseling KRR telah dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebanyak 5 sekolah yaitu PIK-R Ridho di SMP Negeri 3 Sipirok, PIK-R Martondi di SMP Negeri 4 Sipirok, PIK-R Rizki di SMP Negeri 5 Sipirok, PIK-R Saroha di SMP Negeri 6 Sipirok dan PIK-R Anggrek Putih di SMK Negeri 1 Angkola Timur.

Sedangkan kegiatan Penyiapan Tenaga Pendamping di Kecamatan dapat dilaksanakan berupa sosialisasi kepada kelompok yaitu kelompok BKR Mawar desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, BKR Sahata desa Pardomuan Kecamatan Muara Batang Toru, BKR Mangga desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan, BKR Mawar desaa Paran

Padang Kecamatan Sipirok dan BKR Bunga Desa Padang Lancat Kecamatan Batang Toru.

Kemudian Sosialisasi Pengembangan Model BKB-Posyandu-PAUD juga dilaksanakan kepada kelompok BKB Adelwes desa Paranpadang Kecamatan Sipirok, BKB Melati desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, BKB Pardamean Kecamatan Muara Batang Toru, BKB Bunga Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru dan BKB Angrek desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi.

Selanjutnya kegiatan Dana Bergulir untuk UPPKS dapat dilaksanakan dengan sosialisasi sekaligus praktek kepada kelompok UPPKS Saroha desa Pardomuan Kecamatan Muara Batang Toru, UPPKS Martunas desa Tanjung Dolok Kecamatan Marancar, UPPKS Mawar desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat, UPPKS Mangga desa Padang Lancat Sisoma Kecamatan Batang Toru dan UPPKS Mawar desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur.

Adapun Daftar Kelompok Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut Kecamatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Kelompok Ketahanan Keluarga Tahun 2018

No.	Kecamatan	JUMLAH POKTAN				
		BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS
1	Batang Angkola	14	12	5	3	4
2	Sayur Matinggi	10	6	6	1	3
3	Angkola Timur	6	6	3	2	4
4	Angkola Selatan	12	9	3	2	4
5	Angkola Barat	12	10	3	2	4
6	Batang Toru	4	4	5	3	4
7	Marancar	6	6	3	2	4
8	Sipirok	10	10	3	7	4
9	Arse	6	5	3	3	4
10	Saipar Dolok Hole	5	5	3	2	3
11	Aek Bilah	5	2	2	2	2
12	Muara Batang Toru	8	6	7	2	3
13	Tano Tombangan Angkola	10	9	4	2	2
14	Angkola Sangkunur	7	9	7	2	3
Jumlah		115	99	57	35	47

Sumber : Dinas Dalduk dan KB Kab.Tapsel

TABEL 11
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Meningkatkan pelayanan Alat Kontrasepsi (Alkon) kepada Pasangan Usia Subur yang produktif dan potensial	1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Orang)	2,05	2,05
2	Melakukan perencanaan keluarga secara cermat	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,31	2,29
3	Melakukan peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	61,10	74,78
4	Melakukan Pembinaan Keluarga (Bina Keluarga)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,14	9,90
5	Melaksanakan pembinaan keterampilan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Persentase Peserta KB aktif (PA) MKJP	22,30	23,49
6	Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%)	25,00	25,00

TABEL 12
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1.	Keluarga Berencana	Terlaksananya pelayanan Keluarga Berencana kepada PUS yang produktif dan potensial	60 %	60 %
2	Pelayanan Kontrasepsi	Terlaksananya pelayanan Alat Kontrasepsi kepada PUS yang produktif dan potensial	14 Kec	14 Kec
3	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	14 Kec	14 Kec
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	5 Sekolah	5 Sekolah
5	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlaksananya sosialisasi tentang Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	5 Klpk	5 Klpk
6	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Terlaksananya sosialisasi tentang pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	5 Klpk	5 Klpk

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan fungsi kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan.
2. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi.
3. Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi.
4. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang cenderung menurun.
5. Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar.
6. Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB.
7. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK.
8. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga.
9. Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK.
10. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan.
11. Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal
12. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi.
13. Masih banyaknya perkawinan usia muda
14. Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
15. Tingginya perilaku seks pra nikah di sebahagian kalangan remaja

16. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.
17. Masih tingginya jumlah keluarga miskin.
18. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan koseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
19. Pelaksanaan program dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-Kb.
20. Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

Dari beberapa isu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, advokasi dan KIE program KKBPK.
2. Peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan).
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan KKBPK, serta
4. Pengelolaan program KKBPK di Kecamatan.

Selain itu potensi yang juga dapat dikembangkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan melalui program/kegiatan Direktif Presiden adalah "Kampung KB". Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan integrasi kegiatan antara BKKBN Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Penyelenggaraan pelayanan pada setiap bidang digambarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Program Pelayanan Administrasi dengan capaian 100%
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian 100 %
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian 100%
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian 100%

- e. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dengan capaian 100%
 - f. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan dengan capaian 100%
2. Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Penggerakan
- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri dengan capaian 14 Kecamatan.
 - b. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan capaian 100%
3. Bidang Keluarga Berencana
- a. Program Keluarga Berencana dengan capaian 100%
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan capaian 100%
4. Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga
- a. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan capaian 70%
 - b. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD dengan capaian 70%
- 2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD
- Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

Catatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada penambahan kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu penambahan karena adanya penambahan Proyektor/LCD.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor perlu penambahan pagu karena meningkatnya volume kerja.
 - c. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah perlu adanya pergeseran pagu dalam rangka survey dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikarenakan pada kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor perlu penambahan pagu untuk memenuhi informasi yang berkembang.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor perlu penambahan untuk perbaikan, meja, kursi,
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman SKPD perlu penambahan untuk perbaikan taman-taman Perkantoran dan taman jalan nasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur perlu ditampung :
 1. Dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini akan dilaksanakan bimtek tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 2 orang.

4. Program Keluarga Berencana :
 - a. Kegiatan TNI Manunggal KB Kes ini perlu dilaksanakan karena jumlah peserta KB tidak memenuhi target.
 - b. Kegiatan TKBK ini perlu dilaksanakan karena jumlah peserta KB tidak memenuhi target.

5. Program Pelayanan Kontrasepsi ini didapatkan dari pemasangan pelayanan kontrasepsi KB belum diselenggarakan karena menunggu jadwal pelaksanaan serentak dari Provinsi.

6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri :
 - a. Kegiatan Operasional Penyuluh Keluarga Berencana dilaksanakan di seluruh kecamatan dan juga di kampung KB.
 - b. Kegiatan Pembentukan Kampung KB perlu dilaksanakan pembinaan serta evaluasi dalam rangka memperkuat implementasi program KKBPK.
7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dapat tercapai 5 Sekolah.
8. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD dapat tercapai 5 Kelompok.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat sesuai dari hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan yang telah diakomodir lewat e-planning Kabupaten Tapanuli Selatan yang berbasis online dan sudah dibahas pada Musrenbang Kabupaten. Program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan (usulan dari kecamatan data terlampir). Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan.

2. Pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi.
3. Usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
4. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, dan
5. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi OPD.

Tabel 13

Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Keluarga Berencana				
	Kegiatan Dana Bergulir untuk kelompok UPPKS	Kec.Sipirok dan Batang Toru	Terlaksananya Pelatihan UPPKS	2 Kelompok	Praktek Masak Memasak
2.	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR				
	Kegiatan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Tersebar di seluruh kecamatan	Peningkatnya pemahaman anak remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	500 Orang	Sosialisasi kepada Anak Remaja tentang KRR

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa Penyelenggaraan urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan penyelenggaraan dilaksanakan secara konkuren yakni menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara terinci pembagian kewenangan tersebut ditetapkan bahwa terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu :

3.1.1. Pengendalian Penduduk :

- a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian kuantitas penduduk.
- b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota

3.1.2. Keluarga Berencana (KB) :

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan

3.1.3. Keluarga Sejahtera :

- a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3.1.4. Standarisasi Pelayanan dan Sertifikasi.

Menjelang berakhirnya era Milenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bertajuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Berbeda dengan MDGs, tujuan dari SDGs jauh lebih ambisius dan komprehensif. SDGs menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip no one left behind dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Belajar dari pengalaman MDGs, keberhasilan pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Bagian dari perencanaan ini sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 dilakukan melalui serangkaian dokumen perencanaan: Peta Jalan SDGs sampai dengan tahun 2030, Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk periode 2017-2019 dan periode selanjutnya. Semua dokumen perencanaan ini harus dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian SDGs termasuk aspek perencanaannya, diperlukan suatu analisis kesenjangan antara kondisi Baseline dengan target dari indikator-indikator SDGs di tingkat Nasional sampai dengan Daerah.

Adapun target dari indikator-indikator SDGs adalah sebagai berikut :

Dalam kebijakan nasional perencanaan program pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing, oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan terus menyesuaikan dan merespon setiap program dan kegiatan yang berspektif gender. Adapun program dan kegiatan yang berperspektif gender adalah sebagai berikut :

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan program-program sektoral yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, beranjak dari program tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan terus merencanakan program dan kegiatan yang dapat mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu melaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan bagi kelompok UPPKS terhadap ibu-ibu rumah tangga pedesaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan menuju keluarga yang sejahtera.

Adapun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Adapun Tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas.

2. Sasaran

a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

b. Seksi Keluarga Berencana,

1. Meningkatnya Peserta KB Aktif.
2. Meningkatnya Peserta KB Baru.
3. Meningkatnya Kualitas Data dan Pelaporan Pelayanan KB.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB sesuai Standart Operasional Pelayanan (SOP).
5. Meningkatnya Peserta KB Mandiri.
6. Meningkatnya Jumlah Klinik KB.

c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Meningkatnya Jumlah Kelompok PIK- R/M.
2. Meningkatnya Jumlah Kelompok Bina Keluarga
3. Meningkatnya Jumlah Kelompok UPPKS.
4. Meningkatnya Advokasi, dan KIE.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 6. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
 7. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan Kantor.
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan peralatan rumah tangga.
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan.
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Semesteran
- e. Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan:
 2. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten
 - f. Program Keluarga Berencana :
 1. Kesatuan gerak PKK-KB-Kes
 2. Pendataan Keluarga
 3. TNI Manunggal KB Kesehatan.
 - g. Program Pelayanan Kontrasepsi:
 1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
 - h. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri :
 1. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB
 2. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana
 - i. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD:
 1. Hari Keluarga Nasional (HARGANAS).

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB. V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 ini adalah dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati Tapanuli Selatan dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2020.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020, semoga dapat menjadi dokumen yang bermanfaat.

Sipirok, 19 Agustus 2019
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AHMAD IBRAHIM LUBIS,S.Sos.MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19740205 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.	6
2.1. Evaluasai Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Darah.....	30
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	43
BAB V PENUTUP.....	44

KATA PENGANTAR

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh *globalisasi* saat ini maka dibutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan arah dari perjalanan aktivitas organisasi. Untuk itu harus dapat ditentukan *Visi* Organisasi sebagai suatu arah jangka panjang organisasi dengan rencana Strategik sebagai suatu penjabaran cara mewujudkan *Visi*-nya. Sebagaimana *Visi* Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan ini mengacu kepada hasil evaluasi Renja Tahun 2019.

Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi mitra kerja serta segenap yang membutuhkan.

Sipirok, 26 September 2019

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos.MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19740205 199602 1 003**



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2020**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2019**

3. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kebijakan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dilaksanakan melalui Telaah sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
2. Melakukan dan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
3. Melakukan dan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan

4. Seksi Keluarga Berencana

Kebijakan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui Telaah sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan dan Kesertaan Ber KB melalui jalur Swasta sebagai Peserta KB Mandiri.
2. Mengupayakan Peningkatan jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan Pelayanan KB yang berkualitas sesuai Standart Operasional.
3. Mengupayakan Peningkatan Pelayanan Penanganan Kegagalan Pemakaian Alat Kontrasepsi bagi Peserta,
4. Mengupayakan peningkatan Pelayanan KB melalui Mobil Unit Pelayanan (MOYAN) KB.
5. Melaksanakan Pendataan Keluarga sebagai Data Basis dalam Penyusunan Program Keluarga Berencana.

5. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui Telaah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Tujuan Untuk meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Prilaku dan Keterampilan Remaja dalam mempersiapkan Kehidupan Berkeluarga.
2. Membina Instusi masyarakat dalam meningkatkan Peran Serta dalam Pelayanan KB/KR mandiri.
3. Mengupayakan Promosi, Advokasi dan KIE tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui Media Massa dan media Elektronik.
4. Mengupayakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan terhadap kelompok Bina Keluarga.
5. Mengupayakan Kesejahteraan Keluarga melalui Usaha Ekonomi Produktif dalam wadah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN
RENSTRA S/D TAHUN 2017

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Keluaran)/ Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2016)		
								Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8
1	11	01	15	Program Keluarga Berencana						
			02	Jumlah Pelayanan KIE	Terselenggaranya Pelayanan KIE	15 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	100%
			07	Jumlah Peserta KB dalam TNI Manunggal KB Kes	Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kes	100 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100%
			08	Dana Bergulir Untuk Kelompok UPPKS	Terselenggaranya Pelatihan UPPKS	15 Klmpk	14 Klmpk	5 Klmpk	5 Klmpk	100%
			09	Jumlah Pelayanan KB Medis Operasi Wanita/MOW	Terselenggaranya KB Medis Operasi Wanita/MOW	100 Org	50 Org	50 Org	-	-
			10	Jumlah Peserta KB dalam Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Terselenggaranya Kesatuan Gerak PKK KB Kes	100 Org	50 Org	50 Org	-	-
1	11	01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi						
			02	Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terselenggaranya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	15 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	100%
			03	Jumlah Pengadaan Alat Kontrasepsi	Terpenuhinya Pengadaan Alat Kontrasepsi	15 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	100%
			04	Jumlah Pelayanan KB Medis Operasi	Terselenggaranya Pelayanan KB Medis Operasi	100 Org	-	50 Org	-	-
1	11	01	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri						
			03	Jumlah Orientasi Remaja Usia Sekolah	Terselenggaranya Sosialisasi ttg Kesehatan Reproduksi Remaja	15 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	100%
			04	Jumlah Penerangan KIE Melalui Sarana Mupen	Terselenggaranya Penerangan KIE Melalui Sarana Mupen	15 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	100%
			07	Pembentukan dan Evaluasi Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan dan Evaluasi Kampung KB	-	-	1 Kec	1 Kec	100%
1	11	01	20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR						
			01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terselenggaranya Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	15 Sekolah	14 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	100%
1	11	01	23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina						

					Keluarga						
				01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	10 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	100%
1	11	01	24		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD						
				01	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Terselenggaranya Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	10 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	5 Klpk	100%

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2020 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN						
KODE		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)					
1	02	08				8,099,694,080	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8,037,640,668						
1	02	08	01	00		8,099,694,080	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8,037,640,668						
1	02	08	01	00	01	1,569,537,580	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercakupnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,415,926,340						
					01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya benda pos berupa materai dan jasa pengantar surat	250 Buah	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya benda pos berupa materai dan jasa pengantar surat	292 Buah	2,000,000	
					02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	47,166,740	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	38,900,000	
					06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	12,097,460	
					08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	38,383,040	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	43,763,840	
					10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya ATK Kantor	12 Bulan	21,986,080	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya ATK Kantor	12 Bulan	12,000,000	
					11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	18,928,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12,000,000	
					12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3,000,000	
					13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Kec.	182,278,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54 Unit	25,000,000	
					14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	5,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	3,000,000	
					15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16 terbitan	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16 terbitan	10,000,000	
					17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Makanan dan Minuman	592 Kotak	10,035,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Makanan dan Minuman	669 Kotak	10,035,000	
					18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	96 OH	200,390,000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	65 OH	130,390,000	
					19		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	203 OH	76,360,000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	192 OH	50,600,000	
					20		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	933,509,920	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,063,140,040	
1	02	08	01	00	02	142,105,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			69,500,000						
					21		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	21,035,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	7,500,000	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
					23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Dalduk dan KB	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	111,070,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Dalduk dan KB	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	60,000,000	
					25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	10,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	2,000,000	
1	02	08	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100	22,750,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100	22,750,000	
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pakaian Dinas Harian serta perlengkapannya	65 Stel	22,750,000	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	Tersedianya Pakaian Dinas Harian serta perlengkapannya	65 Stel	22,750,000	
1	02	08	01	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	10,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	0	
					01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Dalduk dan KB	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang	0	
1	02	08	01	00	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	51,012,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	30,578,848	
					01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	5 Dok	43,512,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Dalduk dan KB	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	6 Dok	23,000,000	
					02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Dalduk dan KB	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Lap	7,500,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Dalduk dan KB	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Lap	7,578,848	
1	02	08	01	00	07	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan		Cakupan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	100%	52,000,000	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan		Cakupan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	100%	42,170,000	
					17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Kab.Tapsel	Pelaksanaan Stand Pameran pada HUT Tapsel dan Mengikuti Peringatan Hari Proklamasi	2 Kali	52,000,000	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Kab.Tapsel	Pelaksanaan Stand Pameran pada HUT Tapsel dan Mengikuti Peringatan Hari Proklamasi	1 Kali	5,170,000	
					18						Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	Kab.Tapsel	Pelaksanaan Stand Pameran pada HUT Proklamasi RI	1 Kali	37,000,000	
1	02	08	01	00	15	Program Keluarga Berencana		Cakupan KB Kepada PUS Yang Produktif dan Potensial	100%	412,122,000	Program Keluarga Berencana		Cakupan KB Kepada PUS Yang Produktif dan Potensial	100%	182,949,480	
					02	Pelayanan KIE	Kab.Tapsel	Terlaksananya Pelayanan KIE	60 Org	30,000,000	Pelayanan KIE	Kab.Tapsel	Terlaksananya Pelayanan KIE	60 Org	-	
					08	Dana Bergulir untuk Kelompok UPPKS	Kab.Tapsel	Terlaksananya Pelatihan UPPKS	5 Klpk	40,000,000	Dana Bergulir untuk Kelompok UPPKS	Kab.Tapsel	Terlaksananya Pelatihan UPPKS	5 Klpk	0	
					14	Kesatuan Gerak PKK - KB - Kes Terpadu	Kab.Tapsel	Meningkatnya pencapaian peserta KB	210 Orang	75,000,000	Kesatuan Gerak PKK - KB - Kes Terpadu	Kab.Tapsel	Meningkatnya pencapaian peserta KB	625 Orang	75,000,000	
					15	Pendataan Keluarga	Kab.Tapsel	Tersusunnya Grand Design Kependudukan Dinas PP dan KB	1 Dok	133,622,000	Pendataan Keluarga	Kab.Tapsel	Tersusunnya Grand Design Kependudukan Dinas PP dan KB	1 Dok	32,949,480	
					16	TKBK Desa/Kelurahan ke Dusun	Kab.Tapsel	Meningkatnya pencapaian peserta KB	280 Orang	53,620,000	TKBK Desa/Kelurahan ke Dusun	Kab.Tapsel	Meningkatnya pencapaian peserta KB	280 Orang	0	
					21	TNI Manunggal KB Kesehatan	Kab.Tapsel	Meningkatnya pencapaian peserta KB	560 Orang	79,880,000	TNI Manunggal KB Kesehatan	Kab.Tapsel	Meningkatnya pencapaian peserta KB	575 Orang	75,000,000	
1	02	08	01	00	17	Program Pelayanan Kontrasepsi		Cakupan Pelayanan Kontrasepsi Kepada PUS Yang Produktif dan Potensial	100%	82,617,500	Program Pelayanan Kontrasepsi		Cakupan Pelayanan Kontrasepsi Kepada PUS Yang Produktif dan Potensial	100%	80,000,000	
					02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab.Tapsel	Terselenggaranya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	100 Orang	74,082,500	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab.Tapsel	Terselenggaranya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	100 Orang	80,000,000	
					03	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Kab.Tapsel	Tersedianya Site Efek	600 Org	8,535,000	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Kab.Tapsel	Tersedianya Site Efek	600 Org	0	
1	02	08	01	00	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		Cakupan Pembinaan dan Sosialisasi Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	5,542,550,000	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		Cakupan Pembinaan dan Sosialisasi Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	100%	6,118,766,000	
					04	Penerangan KIE Melalui Sarana MUPEN KB	Kab.Tapsel	TerlaksananyaPenerangan KIE Melalui Sarana MUPEN KB	14 Kec	22,280,000	Penerangan KIE Melalui Sarana MUPEN KB	Kab.Tapsel	TerlaksananyaPenerangan KIE Melalui Sarana MUPEN KB	14 Kec	-	
					05	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB	Kab.Tapsel	Meningkatnya peserta KB	1 Unit	1,100,000,000	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Lainnya Penyuluhan KB	Kab.Tapsel	Meningkatnya peserta KB	219 Unit	1,202,523,000	
					06	Operasional Penyuluh Keluarga Berencana	Kab.Tapsel	Meningkatnya peserta KB	24 Orang	4,420,270,000	Operasional Penyuluh Keluarga Berencana	Kab.Tapsel	Meningkatnya peserta KB	24 Orang	4,916,243,000	
1	02	08	01	00	20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		Cakupan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	100%	115,000,000	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		Cakupan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	100%	0	
					01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Kab.Tapsel	Terlaksananya Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100 Orang	115,000,000	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Kab.Tapsel	Terlaksananya Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100 Orang	0	

(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02	08	01	00	24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD		Cakupan Tentang Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	100%	100,000,000	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD		Cakupan Tentang Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	100%	75,000,000	
					02	Peringatan Hari Keluarga Nasional	Kab.Tapsel	Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional	2 Kali	100,000,000	Peringatan Hari Keluarga Nasional	Kab.Tapsel	Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional	2 Kali	75,000,000	
JUMLAH										8,099,694,080			JUMLAH			8,037,640,668